

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah kebutuhan bagi setiap warga Negara Indonesia yang telah diatur dengan jelas dalam undang-undang dasar. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Kerja sama antara ketiga pihak tersebut diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Melalui suasana dan pembelajaran pembelajaran seperti itu diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini, kebijakan pendidikan yang digulirkan pemerintah berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan melalui pengembangan mutu sebagai upaya untuk mengangkat tingkat kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah konsisten melaksanakan berbagai kebijakan yang pada dasarnya terkait dengan pengembangan mutu yang menjadi sasaran utama pendidikan. Antara lain melalui sertifikasi profesional guru, peningkatan kesejahteraan guru,

pelatihan pengembangan karakter guru, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pemberian beasiswa untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan dan lain-lain.

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional, juga diamanatkan implementasi penilaian terhadap pendidikan. Pemerintah melalui diknas juga memiliki kewenangan untuk mengadakan penilaian di samping guru dan satuan pendidikan. Penilaian dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan ujian nasional (UN), yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun ajaran.

Ujian Nasional (UN) sangat dibutuhkan untuk mengontrol kualitas pendidikan dan memetakan kualitas pendidikan secara nasional. Ujian Nasional juga dimaksudkan sebagai bentuk kegiatan penilaian yang secara khusus ditujukan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kompetensi yang dituntut oleh suatu program pendidikan. Bagi sekolah Ujian Nasional dapat dijadikan pemacu persaingan untuk peningkatan kualitas sekolah dan menjadikan

tolak ukur keberhasilan proses belajar siswa serta proses belajar mengajar dari guru suatu program pendidikan dan sekaligus sebagai langkah penentuan kualitas di sekolah yang bersangkutan.

Berangkat dari ketetapan dan arah kebijakan yang ada, pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang desentralisasi pembinaan pendidikan. Demikian pula dengan ikut andilnya masyarakat serta pihak yang terkait untuk turut mengangkat derajat pendidikan Indonesia menjadi lebih maju dan bermutu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dibangun masyarakat dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri dalam hal pengembangan pendidikan sebagai bentuk kepedulian pada pendidikan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, di seluruh Indonesia angka kelulusan dalam suatu Ujian Nasional bisa dikatakan menurun drastis dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menarik untuk diteliti. Dalam satu contoh kasus, kita dapat melihat kasus yang terjadi di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo, 83,61% harus mengulang UN. Dengan adanya kenyataan ini, diperlukan sebuah evaluasi mendasar terutama berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.

Kegagalan siswa dalam suatu Ujian Nasional, dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena proses pembelajaran yang belum efektif, hanya berorientasi pada ketuntasan target kurikulum, “miskin” prakarsa dengan melibatkan keaktifan siswa, dan guru yang tidak memiliki kompetensi dan lain sebagainya.

Kegagalan dalam Ujian Nasional adalah pencerminan kualitas program di setiap satuan pendidikan. Data hasil kelulusan Ujian Nasional dapat dijadikan tolak ukur apakah mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan dan di wilayah tertentu tergolong baik atau masih kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu pemetaan untuk penelitian dengan judul ***“Pemetaan Penguasaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Siswa SMA Pada Ujian Nasional Untuk Mata Pelajaran Fisika Di Kota Gorontalo”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah-masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peta penguasaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar siswa di Kota Gorontalo khususnya pada mata pelajaran fisika berdasarkan hasil ujian nasional 2007/2008,2008/2009 dan 2009/2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang dominan menjadi penyebab kurang dikuasainya Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar siswa pada pelajaran fisika berdasarkan hasil ujian nasional 2007/2008,2008/2009 dan 2009/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- ❖ Untuk mengidentifikasi peta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang belum dikuasai dan yang sudah dikuasai oleh siswa SMA pada mata pelajaran fisika berdasarkan hasil ujian nasional 2007/2008,2008/2009 dan 2009/2010.
- ❖ Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kurang dikuasainya Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar siswa pada pelajaran fisika berdasarkan hasil ujian nasional 2007/2008,2008/2009, dan 2009/2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

✚ Pemerintah Kota Gorontalo

Sebagai salah satu masukan untuk dipertimbangkan para pengambil kebijakan bidang pendidikan pada tingkat provinsi dalam menentukan arah yang akan ditempuh dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah kota Gorontalo.

✚ Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru.

✚ Bagi Sekolah

Sekolah memperoleh data tentang peta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dikuasai atau yang belum dikuasai oleh siswa, faktor-faktor penyebabnya, dan alternative cara pemecahannya.

✚ Bagi Guru

Penelitian ini menjadi bahan masukan kepada guru untuk lebih meningkatkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang belum dikuasai oleh siswa.

✚ Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini akan terbentuk sebuah pengetahuan baru dan tentunya hasil penelitian ini pula adalah bekal kelak untuk menjadi seorang pendidik.